



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B



SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PERIODE TRIWULAN I
JANUARI S/D MARET

2024



bangga
melayani
bangsa

Ber
AKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



info@pn-gunungsitoli.go.id



(0639) 21344- fax (0639) 21343



Jln.Pancasila no.12 Kota Gunungsitoli



www.pn-gunungsitoli.go.id



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

Jln. Pancasila No. 12 Gunungsitoli – 22814 Telepon : (0639) 21344 – Fax (0639/21343)
Email : info@gunungsitoli.go.id , Website : www.pn-gunungsitoli.go.id

Nomor : 844/KPN.W2-U12/PW1.2.1/IV/2024 Gunungsitoli, 22 April 2024
Lampiran : 1 (Dokumen)
Perihal : Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
Pegguna Layanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Periode Januari s/d Maret 2024

Kepada Yth. Bapak Direktur Jendral Badan Peradilan Umum
Di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jln. Jendral Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi yang dilakukan secara rutin per-tiga bulan sekali di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB, dengan ini kami mengirimkan laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Periode Januari s/d Maret 2024 (data terlampir).

Demikian data ini kami kirimkan sebagai laporan dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB



Wijawiyata, S.H.
NIP. 19760522 200112 1 001

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
2. Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
3. Arsip (Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I)

**LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN I**

**PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS IB**



TAHUN 2024

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
DI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B**

Disahkan di Gunungsitoli
22 April 2024



Tim Management,

Wijawiyata, S.H.

NIP. 19760522 2001121001

Sekretaris Tim Survei,

Trisman Zandroto

NIP. 196812291989031002

Ketua Tim Survei,

Fadel Perdamean Bate'e, S.H., M.H.

NIP. 198309142009041002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah disusunnya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB triwulan I tahun 2024 ini.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik yang berorientasi wilayah bebas dari korupsi adalah dengan melakukan survei persepsi korupsi kepada pengguna layanan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB. Dalam survei ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui Aplikasi Sisuper. Survei dilakukan kepada para pengunjung dan pengguna layanan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja tim survei maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB mempunyai komitmen dan tekad yang kuat dalam melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil survei ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujud wilayah bersih dari korupsi.

Demikianlah laporan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB triwulan I tahun 2024 ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya demi terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.

Gunungsitoli, 22 April 2024

Tim Survei

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja.....	2
BAB II METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis.....	4
2.3. Teknik Survei	4
2.4. Teknik Analisis Data	4
2.5. Pelaksanaan Kerja	5
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI	7
3.1. Profil Responden	7
3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator	9
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.....	18
3.4. Persepsi Responden terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.....	19
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	21
4.1. Kesimpulan	21
4.2. Rekomendasi	21
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani. Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3 Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4 Rencana Kerja

1.4.1. Tahap Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a) Penetapan Pelaksana dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimilikinya.

- b) Penyiapan sarana dan prasarana pengisian survei elektronik seperti komputer sehingga mempermudah masyarakat pengguna produk layanan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- c) Penyusunan Jadwal, penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Kerja

Pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB ini dilaksanakan pada Minggu pertama sampai Minggu ke empat bulan Desember 2023. Adapun waktu pelaksanaan dari tiap tahapan dapat dilihat pada jadwal berikut ini:

Tabel 1
Jadwal Pelaksanaan Kerja

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Persiapan	01 April 2024 s/d 05 April 2024
2	Pengumpulan Data / Survei SKM	08 April 2024 s/d 12 April 2024
3	Pengolahan Data	15 April 2024 s/d 19 April 2024
4	Penyusunan dan Pelaporan	22 April 2024 s/d 26 April 2024

1.4.3. Metode Survei

Metode survei dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang bernama SISUPER. Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Umum yang digunakan untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Persepsi anti Korupsi dan Survei Harian.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metodologi Penelitian

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskripsi kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.

2.3. Teknik Survei

Teknik survei yang dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER dengan alamat link <http://esurvei.badilum.mahkamahagung.go.id> dan link yang digunakan responden yaitu <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098696>.

2.4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data pada pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB ini digunakan teknik analisis data kuantitatif.

2.5. Pelaksanaan Kerja

Pengukuran/Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB ini dilaksanakan pada 01 April 2024. Adapun waktu pelaksanaan dari tiap tahapan dapat dilihat pada jadwal berikut ini:

Gambar 1

Model Alur Penyusunan Survei IPK Menuju Zona Integritas



Tabel 2 Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Data
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3 Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00-1.75	25-43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76-2.50	43.76-62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51-3.25	62.51-81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	4	Bersih dari Korupsi

BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

1.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB mayoritas memiliki pendidikan SMA/SMU sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) responden.

Tabel 4 Tingkat Pendidikan

No	Klasifikasi	Frekuensi
1	Tidak/Belum Sekolah	2
2	SD	3
3	SMP/ SLTP	4
4	SMA / SMU	24
5	D1	0
6	D2	0
7	D3	5
8	S1	8
9	S2	0
10	S3	0
Jumlah		46

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebagian besar responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB memiliki pekerjaan dalam kategori lainnya sebanyak 18 (Delapan Belas) responden.

Tabel 5 Jenis Pekerjaan Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi
1	PNS	3
2	TNI	0
3	POLRI	6
4	SWASTA	18
5	WIRSAUSAHA	1
6	TENAGA KONTRAK	1
6	LAINNYA	17
Jumlah		46

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

3.1.3. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada pada kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun - 39 tahun. Bagi kelompok usia 40-49 tahun jumlah responden semakin sedikit, demikian pula kelompok usia 50 tahun – 59 tahun dan terakhir responden pada kelompok usia responden 60 tahun – 69 tahun.

Tabel 6 Usia Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Persen
1	18 Tahun s/d 28 Tahun	15 orang	33,33 %
2	29 Tahun s/d 39 Tahun	18 orang	40,00 %
3	40 Tahun s/d 49 Tahun	5 orang	11,11 %
4	50 Tahun s/d 59 Tahun	6 orang	13,33 %
5	60 Tahun s/d 69 Tahun	1 orang	2,22 %
Jumlah		45 orang	100%

1.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan/Prosedur

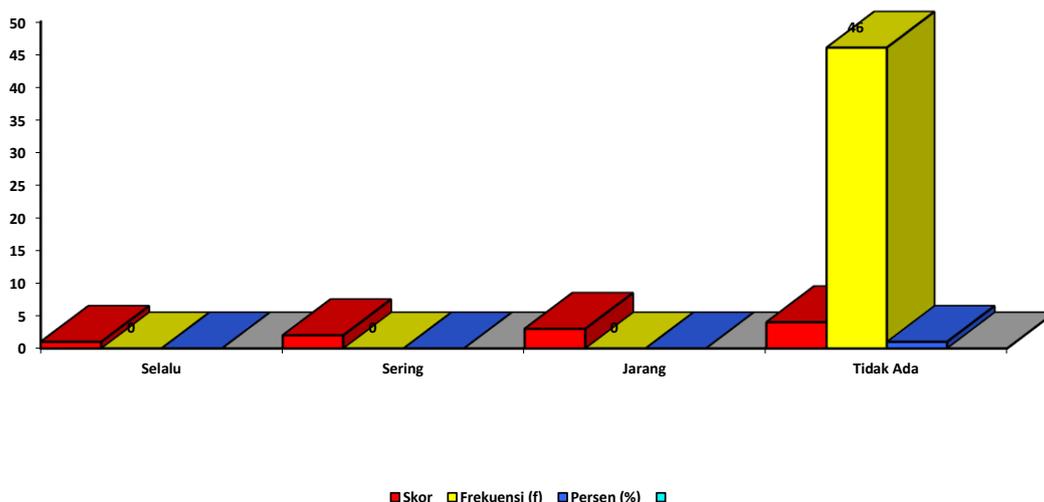
Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil index 4,000. Melalui nilai indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari Korupsi.

Tabel 7 Indikator Manipulasi Peraturan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak Ada	4	46	100%
Jumlah			46	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Manipulasi Peraturan



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil index 4,000. Dari nilai indeks dapat diartikan bahwa

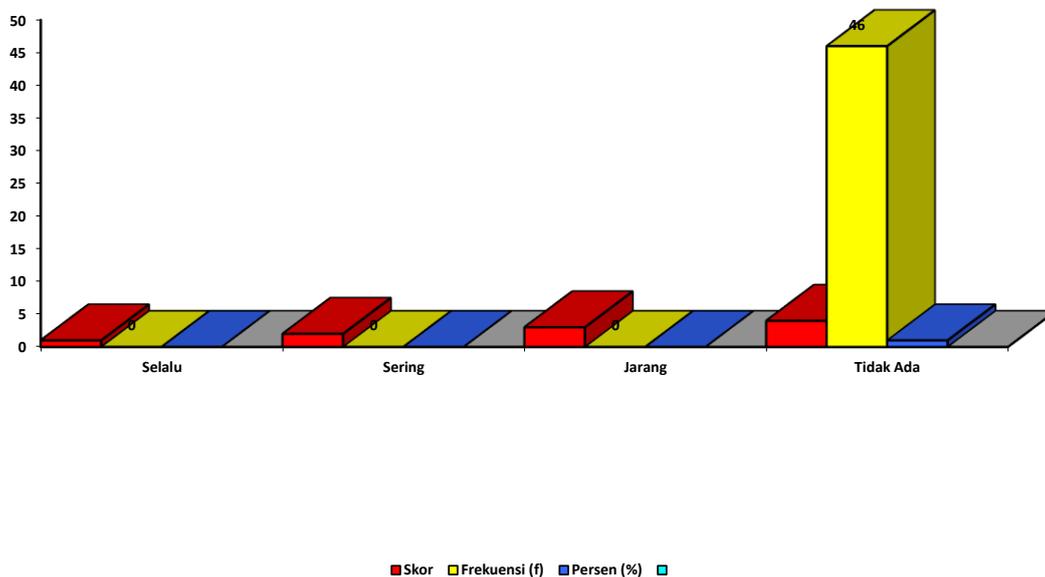
kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari Korupsi.

Tabel 8 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	46	100%
Jumlah			46	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Penyalahgunaan Jabatan



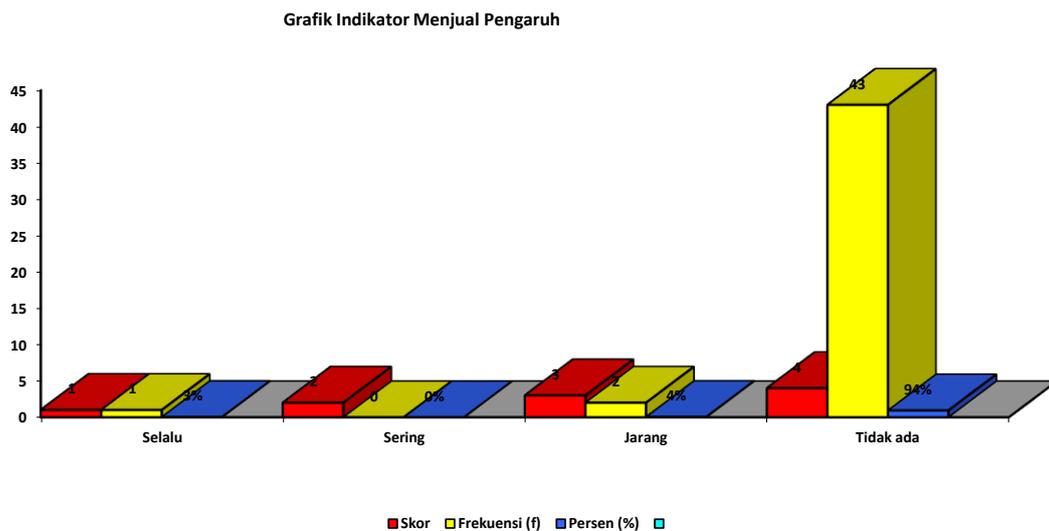
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil index 3,891. Dengan hasil indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

Tabel 9 Indikator Menjual Pengaruh

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	1	3%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	2	4%
4.	Tidak ada	4	43	94%
Jumlah			46	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

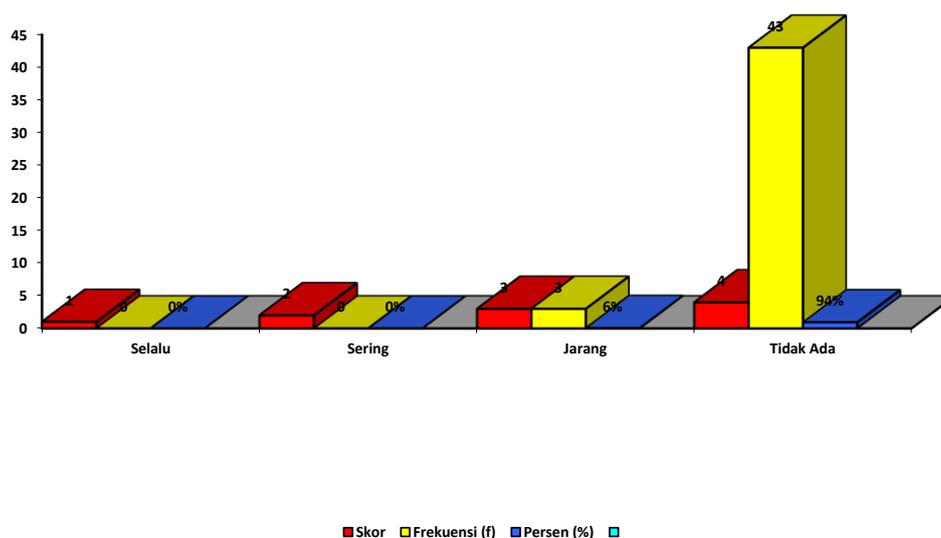
Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil index 3,935. Dari nilai indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungstoli Kelas IB bersih dari korupsi.

Tabel 10 Indikator Transparansi Biaya

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	3	6%
4.	Tidak ada	4	43	94%
Jumlah			46	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Transparansi Biaya



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

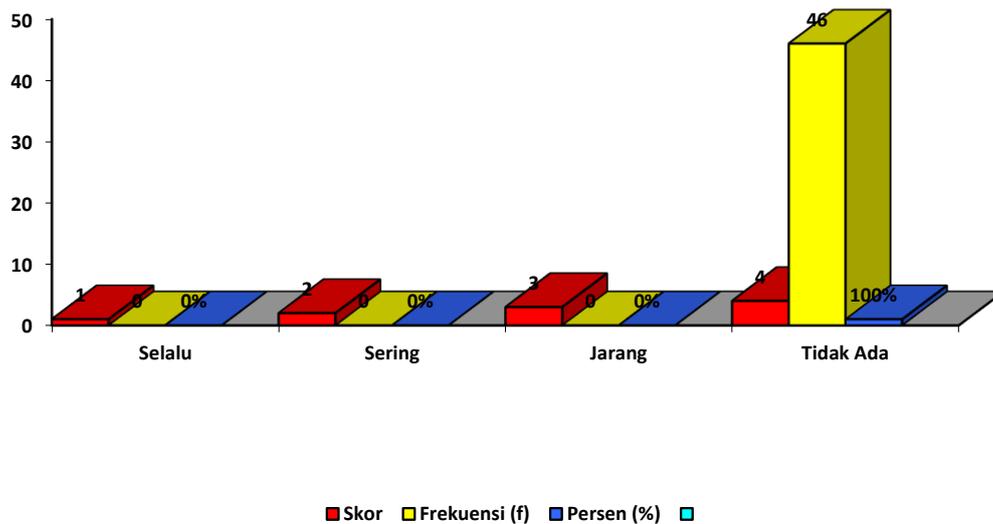
Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil index 4,000. Dari nilai indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

Tabel 11 Indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	46	100%
Jumlah			46	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Biaya Tambahan



3.2.6. Indikator Hadiah

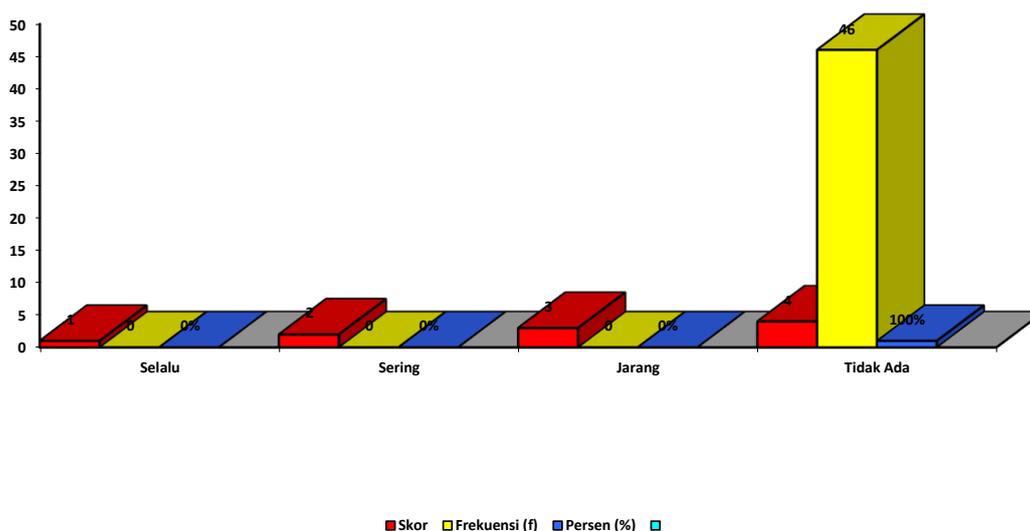
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000. Dengan nilai indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

Tabel 12 Indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	46	100%
Jumlah			46	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Hadiah



3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

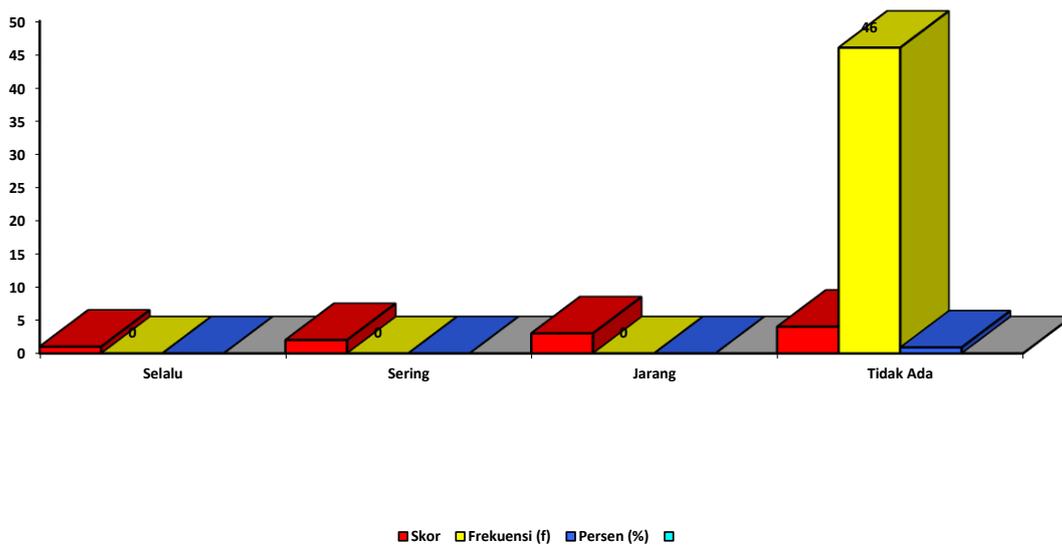
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000. Dari nilai indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

Tabel 13 Indikator Transparansi Pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	46	100%
Jumlah			46	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Transparansi Pembayaran



3.2.8. Indikator Pencaloan

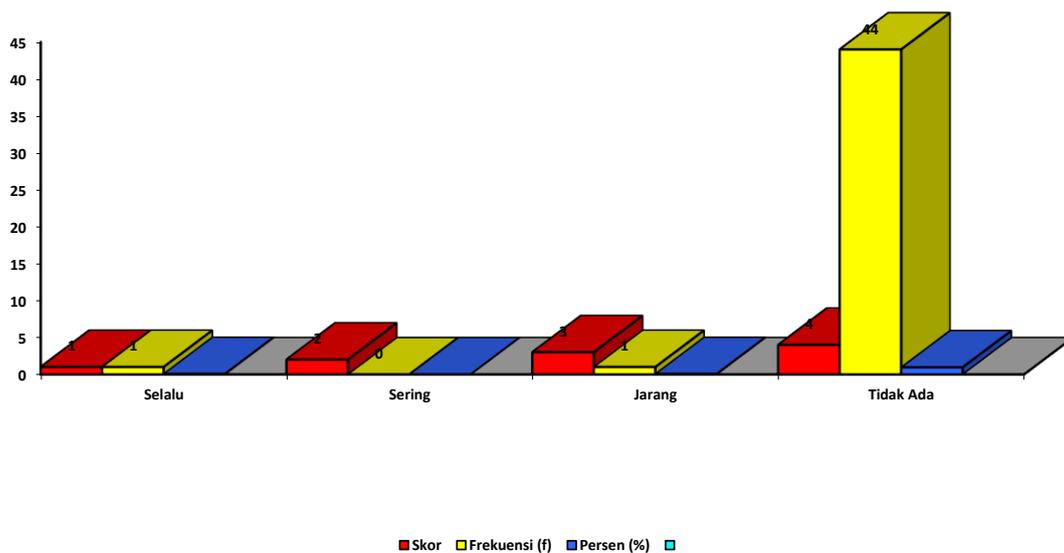
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,957. Dari nilai indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari Korupsi.

Tabel 14 Indikator Pencaloan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	2	5%
4.	Tidak ada	4	44	95%
Jumlah			46	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Pencaloan



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

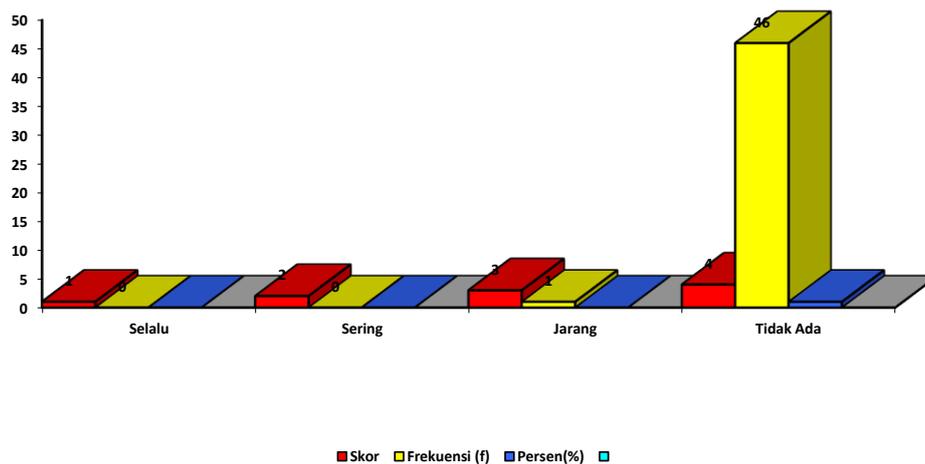
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000. Nilai Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari Korupsi.

Tabel 15 Indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	46	100%
Jumlah			46	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Perbuatan Curang



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

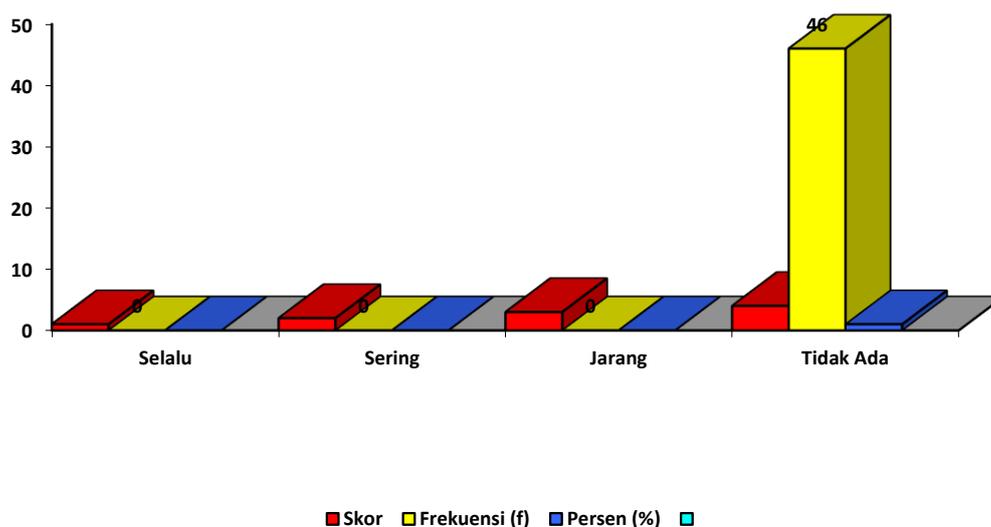
Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil index 4,000. Dari nilai indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

Tabel 16 Indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	46	100%
Jumlah			46	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Transaksi Rahasia



3.3 . Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB sebesar **3,98** dengan persentase **99,46 %** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor Indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**.

**Tabel 17 Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri
Gunungsitoli Kelas IB**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL (SPAK)	MUTU	KINERJA
1	1.00-1.75	25 -43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 -62.50	43.76-62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51-3.25	62.51-81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga mejaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan yang sudah memadai dan terarah untuk dipertahankan;
2. Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan bekerja berdasarkan aturan;
3. Transparansi Biaya sebaiknya lebih dipublikasi;
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dipertahankan agar tidak ada hubungan langsung antara Pegawai dan Pencari Keadilan;
5. Memperbaharui daftar panjar biaya perkara sesuai dengan kondisi saat ini.

**Tabel Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja
Pengadilan Negeri Gunungsitoli**

No.	Uraian	Nilai						Kinerja
		Ber sih	Cuku p Bersih	Kura ng Bersi h	Tida k Bersi h	Nilai Rata- Rata per Ruang Lingku p	NRR Tertim bang (NRR per RL X 1/10)	
		4	3	2	1			
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur pengadilan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B dalam hal manipulasi peraturan?	184	0	0	0	4,000	0,400	Bersih
2	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur pengadilan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B dalam hal Penyalahgunaan Jabatan?	184	0	0	0	4,000	0,400	Bersih
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur pengadilan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B dalam hal Menjual Pengaruh?	172	6	0	1	3,891	0,389	Bersih
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur pengadilan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B dalam hal Transparansi Biaya?	172	9	0	0	3,935	0,393	Bersih
5	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur pengadilan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B dalam hal Biaya Tambahan?	184	0	0	0	4,000	0,400	Bersih
6	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I-B dalam hal Hadiah/Gratifikasi?	184	0	0	0	4,000	0,400	Bersih
7	Bagaimana pendapat Saudara mengenai Pelayanan aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I-B dalam hal Transparansi Pembayaran?	184	0	0	0	4,000	0,400	Bersih
8	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I-B dalam hal Pencaloan?	136	3	0	0	3,957	0,396	Bersih
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I-B dalam hal Perbuatan Curang?	172	6	0	0	4,000	0,400	Bersih
10	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I-B dalam hal Transaksi Rahasia?	184	0	0	0	4,000	0,400	Bersih
Rata-rata Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi							3,98	Bersih

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebesar **3,98** dengan presentase sebesar **99,46%**

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,98** atau **99,46%** masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan/Prosedur, mendapat Indeks 4,000
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,891
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,935
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,000
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,000
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 4,000
8. Indikator Pencaloan, mendapat indeks 3,957
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,000
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000

4.2 Saran

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2024, menunjukkan **bahwa 3 unsur tertinggi terletak pada indikator Manipulasi Peraturan/Prosedur, Penyalahgunaan Jabatan, Biaya Tambahan** dan **3 unsur terendah terletak pada indikator Menjual Pengaruh, Transparansi Biaya dan Pencaloan**. Memiliki nilai indeks paling rendah diantara indikator lainnya, karena itu perlu dievaluasi lagi.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
NOMOR : 33 /KPN/ SK/1/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

- Menimbang** :
- a. Bahwa upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, perlu dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mewujudkan wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
 - b. Bahwa untuk melakukan pengukuran dari hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi terutama komponen hasil pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN dalam hal ini dilakukan pengukuran terhadap persepsi korupsi sehingga hasil suvey ini nantinya diperoleh suatu indeks yang menggambarkan persepsi korupsi dan pemangku kepentingan terhadap Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
 - c. Bahwa yang namanya tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI No. 25 tahun 2009 ;
 - 4. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 25 tahun 2009 ;
 - 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI NO. 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim ;
 - 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita.
 - 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan penanganan pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

-
8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang non yudisial No. 01/WKMA-NY/SK/1/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI .
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI;
- KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini, sebagai Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- KEDUA : Tugas Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah:
1. Melakukan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kepada pengguna layanan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
 2. Menganalisis dan mengolah hasil data survei.
 3. Menyusun laporan hasil survei dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;
- KEDUA : Kepada yang ditunjuk sebagai tim Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam lampiran surat keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 12 Februari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli,

Wijawiyata



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Nomor : 33 /KPN/SK/II/2024

Tanggal : 12 Februari 2024

PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.	Hakim	Ketua Tim
2	Trisman Zandroto	Panitera Muda Hukum	Sekretaris Tim
3	Affection E.M. Gulo, S.Kom.	Jurusita Pengganti	Anggota
4	Deyendi Molore Manalu, S.Sos.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
5	Rahel Ovitalia Sianipar, A.Md., A.B.	Arsiparis -Terampil	Anggota

Di tetapkan di : Gunungsitoli

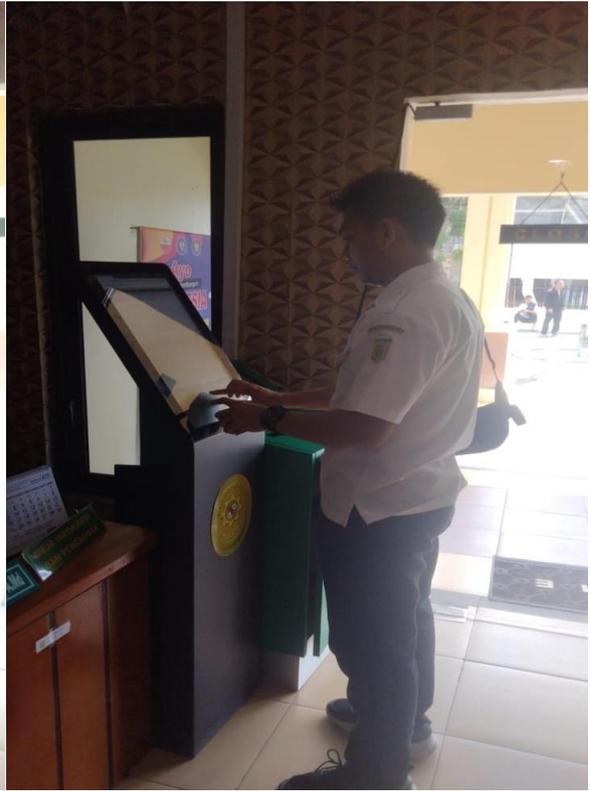
Pada Tanggal : 12 Februari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli,



Wijawiyata

EVIDENCE PENGISIAN SURVEY PADA APLIKASI SI SUPER



TAMPILAN APLIKASI SISUPER

The screenshot shows the SISUPER dashboard interface. At the top, there is a browser window with the URL `esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_dashboard`. Below the browser, the application header reads "APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK". The main content area features a dark background with a mountain landscape and the logo of the Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Three prominent buttons are displayed: "Survey Persepsi Anti Korupsi SPAK", "Survey Kepuasan Masyarakat SKM", and "Survey Harian SH". Each button includes a "Klik Disini" link. At the bottom, a copyright notice states: "Copyright © 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum All Rights Reserved. Waktu Eksekusi : 5.5701, Penggunaan Memori : 1.11MB".

This screenshot displays the "Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK" form. The form is titled "Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan." It is divided into four steps: "1 Data Responden", "2 Layanan", "3 Form Kuesioner", and "4 Kesan & pesan". The "Data Responden" section includes the following fields: "Nama" (with a note "boleh inisial atau tidak diisi"), "Umur / Jenis Kelamin" (with a "tahun" input and "Pilih Jenis Kelamin" dropdown), "Nomor HP" (with a "+62" prefix and a "Contoh : 81211112222" example), "Domisili" (dropdown), "Pendidikan" (dropdown), and "Pekerjaan" (dropdown). A "Kembali" button and a "Selanjutnya" button are located at the bottom right. A blue accessibility icon is visible on the right side of the form.